

**DAMPAK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
dan LELANG (KPKNL) DENPASAR**

Hariyanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

The development of an increasingly advanced economy requires funding sourced from credit facilities provided by banks. In granting credit, banks usually ask for collateral as a guarantee of credit repayment by the debtor (the person who owes), especially if the value of the debt is quite large. The government issued Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights which is expected to provide legal certainty for creditors in carrying out executions if the debtor is in default and if the debtor is stuck in carrying out his obligations, the bank can submit an application for an auction for the execution of Mortgage Rights to the local KPKNL. The transfer of rights to the auction object is carried out through a legal auction process, but there are still problems such as the auction object cannot be controlled by the auction winner based on a court decision, the debtor does not want to surrender the collateral object and often carries out legal resistance. The research method used is empirical juridical using data sourced from the Denpasar State Wealth and Auction Service Office (KPKLN).

Keyword : Mortgage Rights, Executions, Auction

Abstrak

Perkembangan perekonomian yang semakin maju maka dalam usaha diperlukan pendanaan yang bersumber dari fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan. Pemberian kredit biasanya bank meminta agunan sebagai jaminan atas penyelesaian kredit oleh debitur (orang yang berhutang) terutama apabila nilai hutang tersebut cukup besar. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang diharapkan memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur melakukan cidera janji dan jika debitur macet dalam melakukan kewajibannya maka bank dapat mengajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada KPKNL setempat. Peralihan hak obyek lelang dilaksanakan melalui proses lelang yang sah namun masih terjadi permasalahan seperti objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pemenang lelang berdasarkan Putusan Pengadilan, debitur tidak mau menyerahkan benda jaminannya dan sering melakukan perlawanan secara hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Denpasar.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Eksekusi, Lelang